



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. SYAEFUDDIN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 111969

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.081.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/81 m2 di TANAH BUMBU, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 2500 m2 di LAMONGAN, WARISAN Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 322 m2/244 m2 di LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.036.400.000
4. Tanah Seluas 421 m2 di LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 294.700.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 135.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA/MINI BUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 5.165.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 6.771.539

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.228.036.539

III. HUTANG

Rp. 488.079.249

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.739.957.290

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.